

**ORIENTASI PEMILIH TERHADAP FIGUR POLITIK
(Studi Pemilu di Jawa Tengah)**

**VOTERS ORIENTATION AGAINST POLITICAL FIGURE
(Study of Elections in Central Java)**

Arif Sofianto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
email: areef_sofiant@yahoo.com

ABSTRACT

Several studies have been done on the elections in Indonesia concluded that voters are increasingly rational, unaffected by dogma and ideology, but more rational and realistic. This study aims to analyze the change in orientation of the voters against political figures in Central Java. The approach used in this research study is descriptive analysis. There are as many as 400 respondents and key informants involved in the study. This study concludes that individual figures who have seen the effect on the integrity of the option rather than political parties. Although most people still voted for the party, in the 2014 legislative elections, the individual is more important figure than a political party.

Keywords: *elections, figure, politics*

PENDAHULUAN

Demokratisasi di Indonesia selama ini telah menghasilkan pemilih yang semakin rasional. Hasil sebuah survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2011 (LSI, 2011) menemukan bahwa instabilitas pilihan pada partai kemungkinan terkait dengan kecenderungan pemilih rasional. Hal ini menandakan terjadinya pergeseran dari pemilih yang berorientasi ideologi partai menjadi pemilih rasional yang mengutamakan pilihan figur.

Studi yang dilakukan oleh Mujani & Liddle (2010) menghasilkan beberapa temuan penting mengenai rasionalitas pemilih serta figur dan partai. Pemilih telah menetapkan standard tujuan atau prioritas keberhasilan pemimpin berupa: pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, persatuan nasional, pendidikan, dan penegakan hukum. Masyarakat lebih percaya pada individu-individu ketimbang

partai politik, dengan standar individu berupa integritas pribadi, kepedulian sosial, dan kompetensi profesional. Ada kecenderungan meningkatnya peran iklan politik dalam menonjolkan figur, sehingga hanya figur yang memiliki kekuatan iklan di media massa, atau memiliki kesempatan di media massa saja (artis) yang menjadi perhatian.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Marcus Mietzner (2009) menemukan terjadinya lompatan besar dalam politik Indonesia sebagai wujud konsolidasi demokrasi, yaitu kecenderungan baru partai untuk mencalonkan orang yang populer. Periode sebelumnya orang lebih memfokuskan pada pengaruh politik atau kapasitas finansial seseorang, namun hari ini popularitas telah menggeser hal tersebut. Popularitas individual adalah senjata paling ampuh yang ditemukan partai politik selama puluhan tahun berjibaku dalam pemilu.

Menurut hasil survei Sharma, et al (2010) masyarakat lebih menginginkan menentukan siapa calon mereka di parlemen ketimbang ditentukan partai, hal tersebut menandakan rasionalitas pemilih semakin tinggi. Faktor-faktor yang berpengaruh bagi pemilih dalam menentukan figur pilihannya adalah, kepribadian, pengalaman dalam pemerintahan, kinerja masa lalu, dan platform (visi-misi) kandidat. Sebagian besar orang juga meyakini dirinya tidak akan memilih calon yang korup.

Survei yang dilakukan Tim Peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik : (2005) menemukan adanya kecenderungan yang sama. Masyarakat mengharapkan calon kepala daerah yang bersaing adalah orang yang memiliki kualifikasi yang baik, dimana 42% responden menginginkan sosok kepala daerah yang jujur, adil, bertanggungjawab, tidak korupsi, mengayomi rakyat, tidak hanya mengobral janji dan merupakan representasi dari masyarakat. Masyarakat menginginkan dalam kampanye tidak hanya hura-hura semata tetapi yang lebih penting adalah penyampaian program serta visi dan misi para calon kepala daerah, dimana 45% responden mengharapkan bahwa pada saat kampanye tidak ada *money politics*, bersih dari kepentingan elit politik, panitia yang netral, sederhana dan tidak ada kerusuhan.

Di Jawa Tengah, meskipun terdapat pergeseran, ada indikasi masih kuatnya partai, ideologi, agama, dan tokoh masyarakat. Sesuai temuan Sholihin (2009) dalam studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih buruh rokok dalam Pemilu Legislatif Kudus tahun 2009 ditemukan adanya identifikasi calon, mereka akan memilih calon yang menurut kabar perilakunya baik dan mau turun dan berkunjung ke lingkungan masyarakat bawah. Di sisi lain masih adanya identifikasi partai, calon dari

partai besar seperti PDIP, Golkar, PKB maupun PPP mempunyai pengaruh karena sudah dikenal.

Penelitian Wijaya (2008) tentang Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Karanggede, Boyolali dalam Pilgub Jateng 2008 menemukan bahwa tokoh masyarakat merupakan sumber informasi yang mempengaruhi partisipasi politik sampai tingkat tertentu. Faktor ideologi (partai politik pengusung kandidat) merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan memilih mayoritas masyarakat.

Temuan-temuan di atas mengindikasikan adanya pergeseran orientasi pemilih terhadap figur politik, sementara beberapa kelompok masih memegang kebiasaan lama. Tentunya hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi partai politik maupun tokoh-tokoh politik dalam meraih dukungan suara pada pemilu terutama di Jawa Tengah. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis beberapa arus utama orientasi pemilih terhadap figur politik di Jawa Tengah, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif.

Sesuai latar belakang di atas, maka persoalan yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana orientasi pemilih terhadap figur politik pada pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif di Jawa Tengah saat ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 400 orang responden yang tersebar di 10 Dapil di Jawa Tengah serta ditambah beberapa tokoh kunci. Penentuan responden dilakukan dengan teknik *area purposive random sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari

wawancara dan isian kuesioner dari para informan dan responden. Data sekunder berasal dari dokumen terkait objek penelitian, seperti dokumen atau data pemilih, data partisipasi dan dokumen pelaksanaan pemilu. Instrumen yang digunakan dalam ini ialah panduan wawancara mendalam untuk informan dari pemerintah, KPU dan tokoh masyarakat. Untuk responden menggunakan daftar pertanyaan tertutup atau kuesioner, baik melalui wawancara atau responden mengisikan langsung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang merupakan kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan perhitungan frekuensi, rerata, tabulasi silang dan persentase. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan teknik deskriptif analitis. Analisis data merupakan upaya mencermati dan mensistematiskan data-data yang diperoleh melalui wawancara, diskusi, observasi maupun telaah dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Jawa Tengah merupakan wilayah penting dalam pertarungan politik yang dapat mempengaruhi politik nasional. Banyak anggota DPR RI yang cukup menonjol berasal dari daerah pemilihan di Jawa Tengah. Beberapa partai besar menempatkan kader-kader pentingnya di Dapil-dapil di Jawa Tengah karena memiliki potensi besar untuk menang. Jumlah pemilih di Jawa Tengah adalah berada pada urutan ke-3 setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Berdasarkan tipologi perwilayahan, Jawa Tengah dapat diklasifikasikan menjadi wilayah Pantura, Wilayah Tengah dan Selatan. Wilayah Pantura secara historis identik dengan wilayah santri, yang pada masa Orde Baru identik dengan pemilih hijau. Partai-partai berbasis

agama (Islam) mendapatkan suara yang cukup besar di daerah Pantura. Namun seiring perkembangan politik, dominasi tersebut mulai berkurang dan partai-partai berhaluan nasionalis mulai mendapatkan tempat di wilayah Pantura.

Wilayah Tengah dan Selatan memiliki tipologi yang hampir sama, yakni suara didominasi oleh partai-partai nasionalis. Pemilih lebih loyal kepada partai politik berhaluan nasionalis, terutama partai yang sudah cukup lama berdiri. Namun demikian, sama halnya dengan wilayah pantura, mulai terjadi pergeseran di mana pemilih tidak lagi setia terhadap partai, namun lebih condong untuk memperhatikan figur calon anggota legislatif. Secara umum di Jawa Tengah telah terjadi pergeseran orientasi pemilih dari pemilih yang loyal terhadap partai yang berbaiskan agamis di Pantura dan Nasionalis di Tengah dan Selatan menjadi pemilih yang rasional pragmatis dan kedudukan figur menjadi penting.

Pelaksanaan pemilu legislatif di Jawa Tengah selama ini berjalan dengan lancar, tanpa gejolak dan konflik yang berarti, walaupun terjadi beberapa pelanggaran. Tingkat partisipasi dalam pemilu secara umum merosot dari masa ke masa sesuai dengan kondisi umum di tingkat nasional, namun tingkat partisipasi masih terbilang rata-rata jika dibandingkan dengan daerah lain, yaitu 71%, sama dengan rata-rata Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, terdapat penurunan sebesar 12,27%.

Pada pemilu 2009 teridentifikasi adanya dualisme orientasi pemilih, di satu sisi dengan sistem terbuka pemilih lebih memperhatikan caleg, di sisi lain kebanyakan pemilih masih bimbang dengan calon yang ada, sehingga mereka menyerahkan pilihannya kepada partai politik. Pemilu tahun 2009 merupakan era transisi dari pemilih yang loyal kepada partai politik kepada pemilih yang lebih

mengutamakan caleg. Hal tersebut terbukti dari sedikitnya caleg yang memperoleh suara memenuhi BPP, kebanyakan memilih partai politik, di sisi lain pemilih yang loyal terhadap partai politik juga menurun, dengan perbedaan perolehan suara partai politik antar level pemilu maupun antar waktu yang berbeda.

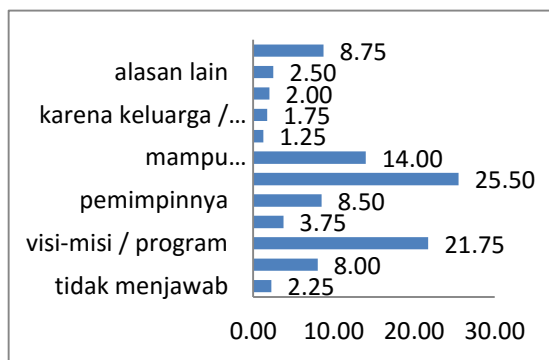
Secara umum, suara di Jawa Tengah dikuasai oleh partai nasionalis. Partai Gerindra dan Partai Hanura merupakan pendatang baru yang cukup berhasil dalam mengumpulkan suara di Jawa Tengah. Pada pemilu pertama yang diikuti kedua partai tersebut, perolehan suara cukup tinggi sehingga mampu mengantarkan calon legislatif menjadi pemenang untuk tingkat nasional maupun daerah. Di sisi lain, suara dan perolehan kursi partai-partai besar yang sudah cukup lama berdiri mengalami penurunan, terutama PDI Perjuangan. Hal ini semakin menegaskan bahwa loyalitas terhadap partai politik menurun, dan perolehan suara cenderung semakin terdistribusi merata diantara partai-partai yang ada. Peranan partai berbasis agama (Islam) cenderung menurun dan pemilih bergeser menjadi rasional. Hanya PKS sebagai partai berbasis Islam lebih baru dan

modern yang mampu meningkatkan posisinya. Sedangkan PAN sebagai partai yang kurang tegas basis agama maupun nasionalismenya cenderung *stagnan*.

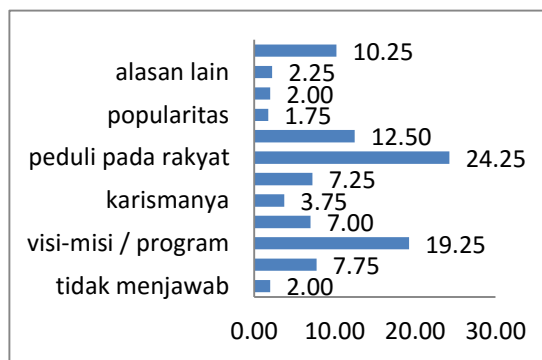
B. Figur politik

Figur politik dalam hal ini dibedakan menjadi partai politik dan calon legislative atau calon kepala daerah. Figur politik pada masa ini cukup menentukan apakah seseorang akan memilih atau tidak.

Ketika ditanyakan mengenai hal apa yang menjadi pertimbangan utama responden dalam memilih partai politik dan calon legislatif, sebagian besar responden memilih figur politik dengan alasan peduli pada rakyat. Alasan lain yang dominan adalah visi-misi dan programnya. Untuk partai politik, responden juga mengharapkan mampu menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk calon legislatif, responden mengharapkan calon yang mereka pilih mampu bersikap anti korupsi, hal ini berkaitan dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi dari unsur partai politik baik di legislatif maupun eksekutif, di pusat maupun di daerah. Gambar 1 dan 2 di bawah ini menampilkan tanggapan responden mengenai pertimbangan utama dalam memilih partai politik dan calon legislatif.



Gambar 1. Pertimbangan utama dalam memilih partai politik



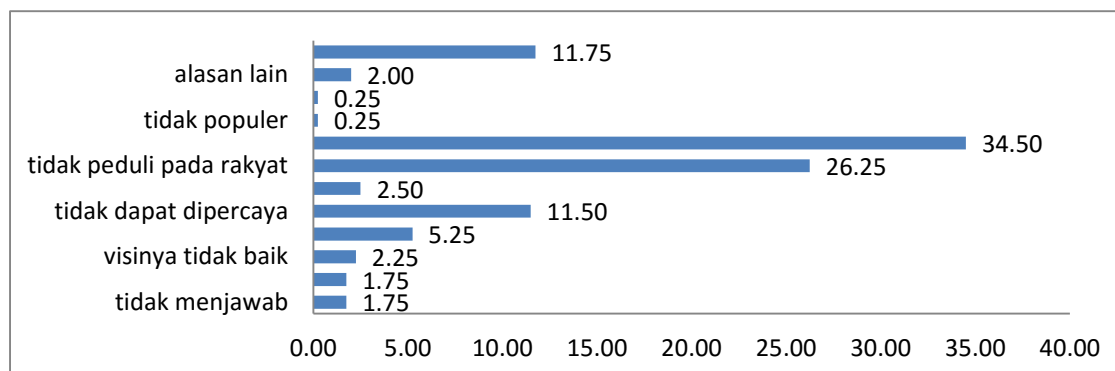
Gambar 2. Pertimbangan utama dalam memilih calon legislatif

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka membenci seorang caleg atau partai politik tertentu

terutama karena alasan korupsi (34,50%) dan juga karena tidak peduli pada rakyat (26,25%). Gambar 3 di bawah ini

menampilkan data mengenai tanggapan responden mengenai persoalan yang tidak

disukai dari seorang caleg atau partai politik.



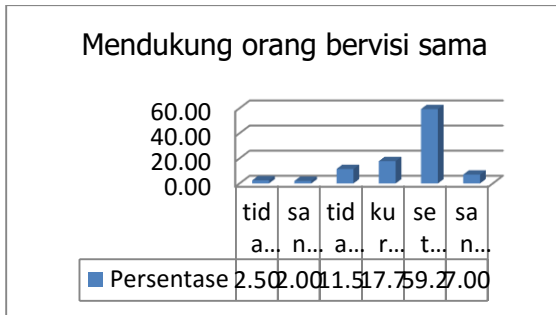
Gambar 3. Persoalan yang tidak disukai oleh responden

Gambaran di atas merupakan wujud kekecewaan masyarakat terhadap perilaku korup para pemimpin yang mereka pilih. Kebanyakan orang menyatakan bahwa para elit politik saat ini hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, dengan kekecewaan tersebut, menurunnya angka partisipasi dalam pemilu menjadi beralasan. Di sisi lain, meskipun sebagian orang menganggap politik uang sebagai permulaan dari perilaku korup para elit, kebanyakan pemilih juga masih menikmati adanya politik uang dalam pemilu, bahkan menganggap pemilu sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan materi, terutama dalam masa kampanye.

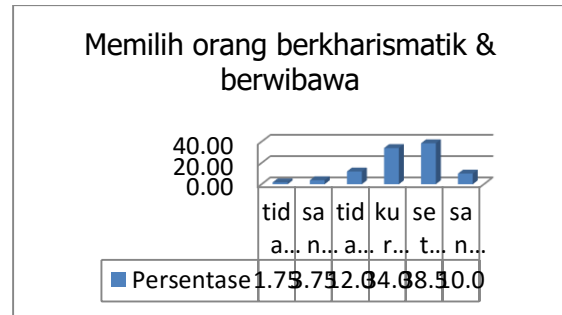
Mengenai strategi kampanye yang efektif, kepada responden ditanyakan persoalan berkaitan dengan persepsi terhadap calon dan partai mengenai visi dan misinya, kepribadian dan kedekatannya dengan responden. Ketika ditanyakan apakah lebih mendukung orang yang bervisi sama atau tidak, sebagian besar menyatakan mereka setuju (59,25%). Mereka menyatakan setuju karena dengan visi yang sama banyak keinginan yang terakomodasi dan arah pembangunan sesuai yang diharapkan. Sedangkan

mereka yang kurang setuju atau tidak setuju berpendapat bahwa visi dan misi yang dijanjikan belum tentu terwujud, lebih banyak hanya jargon kampanye saja, karena kenyataannya tujuan setiap orang berbeda-beda. Orang yang terlihat bervisi sama belum tentu memperjuangkan keinginan rakyat. Gambar 4 menunjukkan pendapat responden mengenai calon yang bervisi sama.

Untuk persoalan karismatik dan berwibawa, pendapat responden antara yang kurang dan tidak setuju dengan yang setuju relatif sama banyaknya. Persoalan kewibawaan memang menjadi perdebatan. Mereka yang menyatakan tidak setuju beralasan bahwa orang yang karismatik dan berwibawa belum tentu kinerjanya baik, karena hal tersebut tidak menjamin kemampuan, kebanyakan karismatik dan berwibawa hanya di penampilan saja. Di sisi lain mereka yang setuju menyatakan bahwa kewibawaan sangat dibutuhkan di Indonesia, karena menandakan cara pikir yang baik. Karismatik dan kewibawaan juga merupakan modal untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Gambar 5 menunjukkan pendapat responden tentang calon yang karismatik dan berwibawa.



Gambar 4. Kesiediaan mendukung yang bervisi sama

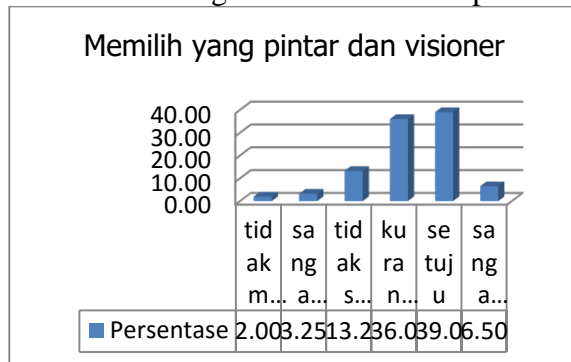


Gambar 5. Kesiediaan mendukung orang yang berwibawa & karismatik

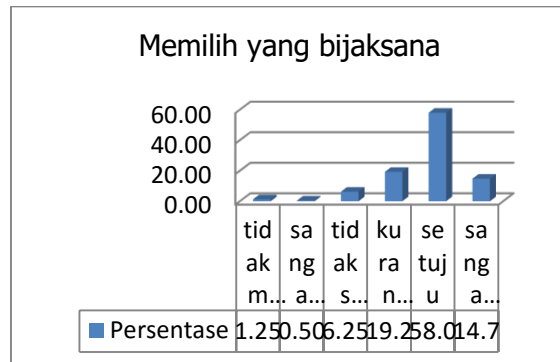
Pendapat responden mengenai apakah mendukung orang yang terlihat pintar dan visioner juga terbelah menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang kurang setuju dan mereka yang setuju. Mereka yang kurang setuju dan tidak setuju memilih orang yang pintar dan visioner berpendapat bahwa seringkali kepintaran itu justru hanya digunakan memanfaatkan rakyat bodoh untuk kepentingan sendiri, karena orang pintar belum tentu baik. Mereka belum tentu benar, dan kebanyakan membodohi rakyat. Kepintaran tersebut juga tidak menjamin kemampuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, mereka yang setuju berpendapat bahwa pemimpin yang pintar dan visioner akan mengetahui keinginan rakyat. Pintar dan visioner merupakan modal utama untuk memimpin dan melaksanakan rencana pembangunan.

Lain halnya dengan bijaksana, dimana sebagian besar responden

mengharapkan pemimpin yang bijaksana (58%). Kebijakan seorang pemimpin akan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Orang yang bijaksana dianggap pandai menyelesaikan permasalahan dan akan selalu berlaku adil. Kebijakan akan cepat memahami masalah dan mencari solusinya, memiliki alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah.. Bagi mereka yang kurang setuju atau tidak setuju berpendapat bahwa belum tentu orang bijaksana bisa membawa rakyat menjadi makmur. Bijaksana diasosiasikan kurang tegas dan kurang disiplin dan rentan berbagai penyimpangan, karena dalam mengambil keputusan harus memperhatikan berbagai kelompok dan golongan, kebanyakan yang terjadi adalah kompromi. Gambar 6 dan 7 di bawah ini menunjukkan kesiediaan responden memilih orang yang pintar dan visioner serta orang yang bijaksana.



Gambar 6. Kesiediaan mendukung orang yang pintar & visioner



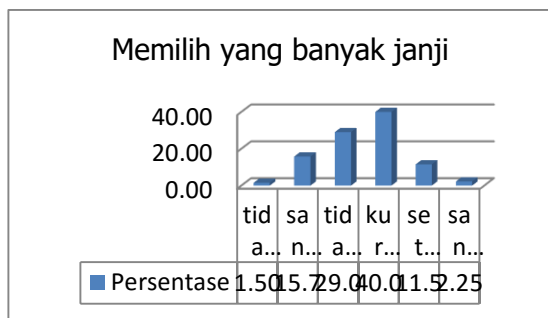
Gambar 7. Kesiediaan mendukung orang yang bijaksana

Ketika ditanyakan mengenai caleg yang sering mengumbar janji dan memberikan keuntungan materi (politik uang), sebagian besar responden menyatakan tidak setuju. Orang yang terlalu banyak janji memberikan kesan negatif bagi caleg di mata pemilih karena kebanyakan orang yang berjanji apalagi terlalu banyak janji, sudah menyimpan potensi pembohongan sejak awal dia menyatakan. Sedangkan keuntungan materi dipandang sebagai hal yang nantinya akan memberikan dampak kurang baik bagi pemilih, serta dampak bagi caleg adalah mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan dengan cara korupsi.

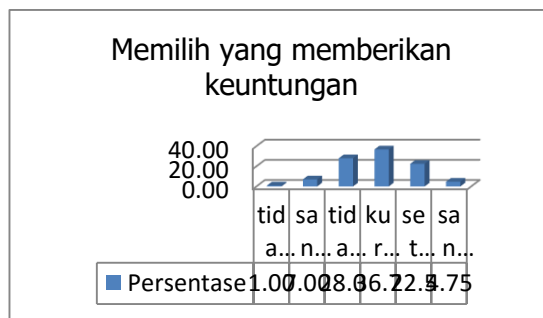
Mereka yang tidak setuju dan kurang setuju memilih orang yang banyak janji karena kebanyakan caleg yang berjanji hanya mempergunakan untuk bahan kampanye yang nantinya dilalaikan ketika mereka menjabat. Masyarakat lebih membutuhkan bukti konkret dibanding janji. Kesan negatif muncul bagi caleg yang mengobrol banyak janji. Sebaliknya mereka yang setuju memilih orang yang banyak janji dengan catatan bahwa janji harus dipenuhi dan mereka berharap bisa terbukti. Sehingga secara umum banyak

berjanji tidaklah efektif untuk kampanye, bahkan berdampak negatif.

Untuk keuntungan materi, terdapat ketakutan bahwa mereka meragukan pemimpin yang memberikan keuntungan materi pada saat pemilu nantinya akan berbuat korupsi. Pemilih berpendapat bahwa yang diinginkan adalah kesejahteraan seluruh warga negara yang tidak mungkin didapat melalui politik seperti itu. Di sisi lain mereka yang setuju memilih orang yang memberikan keuntungan materi beralasan karena dalam momen pemilu dapat menjadi arena memperoleh keuntungan. Bahwa hasil pemilu sama saja, dan mereka lebih baik mendapatkan sesuatu daripada tidak. Pernyataan tersebut mewakili ketidakpercayaan masyarakat terhadap para elit yang terpilih, sekaligus ketidakpedulian terhadap demokratisasi. Hal tersebut merupakan dampak dari kekecewaan terhadap pemerintahan dan rendahnya pendidikan politik selama ini. Gambar 8 dan 9 di bawah ini menunjukkan pendapat responden mengenai kesediaan mereka memilih orang yang banyak janji dan yang memberikan keuntungan langsung.



Gambar 8. Kesediaan mendukung orang yang banyak janji



Gambar 9. Kesediaan mendukung orang yang memberikan keuntungan

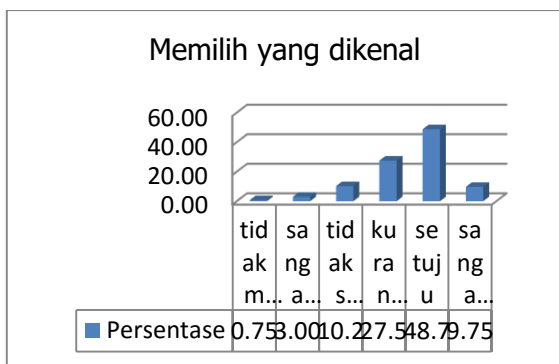
Mengenai kedekatan dengan responden, sebagian besar setuju bahwa mereka akan memilih orang yang dikenal (48,75%). Mereka beralasan bahwa dengan kenal maka mengetahui berbagai sisi kepribadian, pandangan dan perannya,

sehingga tidak memilih kucing dalam karung. Mereka juga dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi, pendapat dan kritikan. Sementara mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa kenal tidak

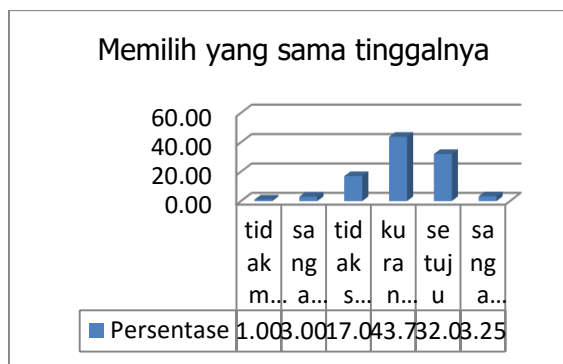
menjamin orang tersebut baik dan dapat menyalurkan aspirasi pemilih.

Pemilih juga kurang setuju jika mereka memilih calon yang berdekatan tempat tinggalnya. Alasannya sama dengan sebelumnya, yaitu belum tentu orang tersebut baik dan mampu menyalurkan aspirasi. Sedangkan di sisi lain mereka yang setuju memilih orang dari tempat tinggalnya berharap bahwa caleg tersebut dapat memberikan kemajuan bagi tempat tinggalnya, mengutamakan pembangunan di wilayahnya, serta menyalurkan aspirasi masyarakat sekitar. Di sisi lain ada

sebagian orang yang mempertimbangkan kemampuannya. Meskipun pemilih mengenal dan berdekatan tempat tinggalnya, mereka hanya akan memilih jika caleg tersebut memang memiliki kapasitas dan dapat dipercaya, namun jika tidak, mereka akan memilih orang lain. Pemilih tipe ini adalah mereka yang sudah berfikir kritis dan rasional yang bermakna positif. Gambar 10 dan 11 di bawah ini menyajikan pendapat responden mengenai kesediaan mereka memilih orang yang dikenal dan sama tempat tinggalnya.



Gambar 10. Kesediaan mendukung orang yang dikenal

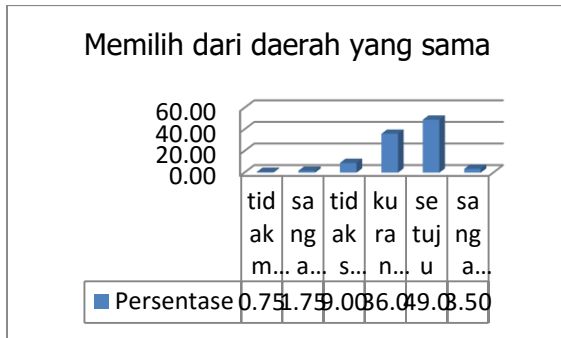


Gambar 11. Kesediaan mendukung orang yang bertempat tinggal berdekatan

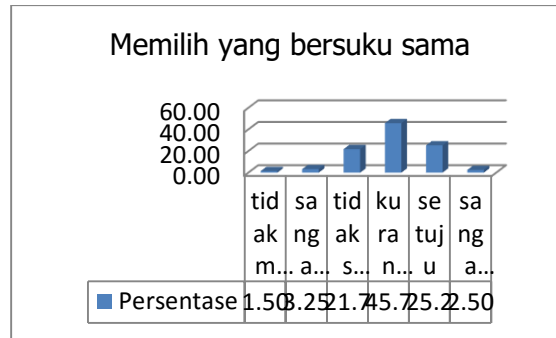
Alasan mengenai asal daerah yang sama juga hampir mirip. Sebagian besar responden (49%) menyatakan mereka setuju memilih orang dari daerah sama dengan harapan dapat memajukan daerahnya. Sementara mereka yang tidak setuju dan kurang setuju berpendapat bahwa belum tentu orang yang berasal dari daerah sama itu benar dan dapat dipercaya serta akan memperjuangkan daerahnya, karena kenyataannya kebanyakan pejabat yang terpilih hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sedangkan untuk persoalan etnisitas, sebagian besar responden menyatakan mereka kurang setuju jika harus selalu memilih orang dari suku yang sama. Alasannya adalah karena suku tidak menentukan kualitas dan bukan patokan

untuk dipilih. Responden juga berpendapat bahwa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika terdiri dari beragam suku yang semuanya memiliki hak sama. Sementara mereka yang setuju memilih dari suku sama menyatakan bahwa dengan suku sama maka karakter dan pola pikir sama dan diharapkan mengutamakan wilayahnya. Kesamaan budaya, tradisi dan pola pendidikan menjadi jaminan bahwa seseorang dari suku yang sama akan memiliki pola pikir, harapan, kebijaksanaan dan perilaku yang sesuai dengan kehendak, nilai, norma pemilih dari suku sama. Gambar 12 dan 13 di bawah ini menyajikan data kesediaan responden memilih calon dari daerah dan dari suku yang sama



Gambar 12. Kesiediaan mendukung orang yang sama daerahnya

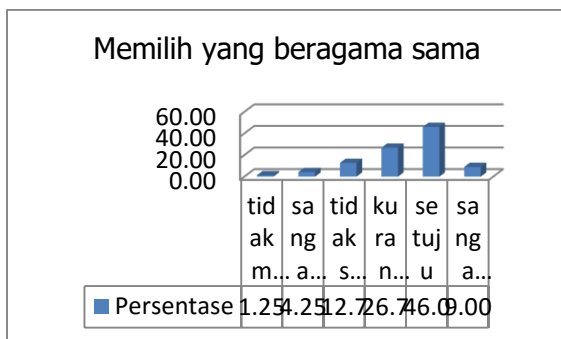


Gambar 13. Kesiediaan mendukung orang yang sama sukunya

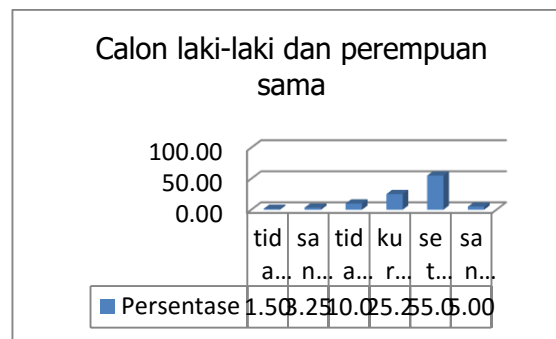
Berbeda dengan persoalan kesukuan, persoalan agama lebih sensitif dalam menentukan pilihan. Sebagian besar pemilih (46%) lebih mengutamakan memilih dari orang yang beragama sama. Alasannya adalah karena orang yang seagama mempunyai ukuran kebenaran yang sama, hukum yang sama, jika berbeda agama maka akan berbeda pola pikirnya. Sementara mereka yang kurang dan tidak setuju harus selalu memilih dari agama sama memiliki pendapat bahwa agama bukan menjadi jaminan kinerja seseorang bagus, yang mereka pilih adalah orang yang kapabel tidak bermasalah jika agamanya berbeda. Dengan demikian, meskipun telah terjadi pergeseran pemilih menjadi rasional, namun nilai agama juga masih berpengaruh pada sebagian pemilih.

Gambar 14 menunjukkan kesiediaan responden memilih orang dengan agama yang sama.

Untuk persoalan gender, mayoritas responden (55%) tidak membedakan jenis kelamin. Mereka bersedia memilih calon perempuan maupun laki-laki. Mereka beralasan bahwa kemampuan lebih utama dibanding dengan jenis kelamin, bahkan dalam beberapa segi perempuan lebih baik. Namun demikian, masih terdapat pihak yang tidak setuju dan menyatakan bahwa pemimpin (sebagai imam) lebih baik adalah laki-laki, hal ini merupakan pengaruh nilai agama yang masih cukup kuat. Gambar 15 menunjukkan pandangan responden terhadap calon laki-laki dan perempuan.



Gambar 14. Kesiediaan mendukung orang yang beragama sama



Gambar 15. Calon laki-laki dan perempuan sama saja

Pemilih laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak membedakan jenis kelamin dalam memilih pemimpin.

Responden laki-laki dan responden perempuan tidak ada perbedaan dalam memandang jenis kelamin caleg, sebagian

besar sepakat memberikan kesempatan yang sama. Sebagian besar responden (42,75%) menyatakan bersedia memilih calon perempuan. Bagi mereka, perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, semuanya harus diberikan kesempatan yang sama dalam memimpin. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan beberapa pemimpin perempuan selama ini.

Sesuai penjelasan di atas, ada beberapa unsur ciri figur yang menjadi perhatian pemilih, yaitu berupa ciri kapasitas individual dan ciri demografis. Kapasitas individual yang memberikan pengaruh positif seperti visioner, kebijaksanaan dan pengetahuan. Sedangkan kapasitas caleg yang memberikan pengaruh negatif adalah sering mengobral janji dalam kampanye. Sebaliknya, caleg yang memiliki peran nyata di masyarakat, tidak terlalu obral janji, lebih memiliki kesempatan untuk dipilih.

Ciri demografis dimaknai sebagai bahan pertimbangan setelah pemilih mengetahui kualitas calon. Baik dari asal, tempat tinggal, suku, maupun agama, akan menjadi pertimbangan berikutnya ketika kualitas dan kapasitas seorang caleg sudah teruji. Jika seorang caleg terbukti memiliki kapasitas, maka pertimbangan pemilih akan tertuju pada ciri demografis tersebut.

Sementara untuk aspek strategi kampanye dengan memberikan uang atau politik uang, tidak tergantung dari kapasitas maupun ciri demografis seorang caleg, semua memiliki kesempatan yang sama. Rasionalitas ekonomis pemilih akan menentukan pilihan apakah orang yang memberikan uang paling banyak ataukah pihak terakhir yang memberikan uang yang akan dipilih.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor figur politik berupa tokoh individu yang memiliki integritas terlihat semakin berpengaruh terhadap pilihan ketimbang partai politik. Meskipun sebagian besar orang masih memilih partai, di pemilu legislatif 2014 nanti, diperkirakan figur individu lebih penting dibanding partai politik. Hasil-hasil temuan data lapangan menunjukkan adanya kecenderungan:

1. Pemilih lebih mengutamakan figur individu yang peduli pada rakyat serta visi-misi dan programnya dianggap sejalan serta bersikap anti korupsi.
2. Partai politik dengan dukungan terbanyak adalah yang relatif tidak memiliki banyak persoalan atau terlibat berbagai masalah.
3. Kebanyakan menyatakan bahwa para elit politik saat ini hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, maka membuat pemilih tidak lagi berminat terhadap pemilu.
4. Pemilih tidak terlalu memperhatikan figur individu yang karismatik dan berwibawa, sedangkan figur individu yang bijaksana lebih diharapkan.
5. Pemilih tidak menyukai calon yang sering mengumbar janji karena terlalu banyak janji dianggap semakin banyak mengingkari. Banyak mengumbar janji memberikan kesan negatif bagi calon di mata pemilih
6. Calon yang dianggap melakukan *money politics* dianggap sebagai benih korupsi yang nantinya akan memberikan dampak kurang baik bagi pemilih.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan usaha secara bertahap dan konsisten, misalnya melalui proses pendidikan politik, pendidikan keluarga dan sekolah untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang demokrasi dan pemilu kepada pemilih;
2. Perlunya perhatian yang lebih serius terhadap persoalan kapabilitas calon di mata pemilih, integritas pribadi calon, integritas partai serta hubungan elit politik/pimpinan dengan masyarakat melalui media-media yang ada sehingga masyarakat bisa memahami dan mendukung figur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mietzner, Marcus (2009), *Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia Catalyst or obstacle to democratic consolidation?*, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 165, no. 1 (2009), pp. 95–126, <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv>
- Sharma, Rakesh Lauren Serpe, and Astri Suryandari (2010), *Indonesia Electoral Survey 2010* November 2010, IFES (International Foundation for Electoral Systems) for the Australian Agency for International Development
- Lembaga Survey Indonesia (2011), *Pemilih Mengambang Dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik, Rilis tahun 2011*
- Mohammad Sholihin, 2009, *Perilaku Pemilih Buruh Rokok Dalam Pemilu Legislatif Langsung Di Kabupaten Kudus*, Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Mujani, Saiful and R. William Liddle (2010), *Indonesia; personalities parties, and voters*, *Journal of Democracy* Volume 21, Number 2 April 2010, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Pres
- Tim Peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik, 2005, *Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PEMILU LEGISLATIF)*
- Wijaya, Sri Herwindya Baskara, 2008, *Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Kasus mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Karanggede, Boyolali dalam Pilgub Jateng 2008)*, UNS Surakarta
- Basis Data Tanpa Penulis**
KPU, *Pemilu Tahun 2009 Dalam Angka*, www.kpu.go.id
KPU Jawa Tengah, 2005, *Pemilu Dalam Angka 2004 - 2005*
_____, 2009, *Buku Kilasan Pemilu 2009*